

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 1 8



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Suara Merdeka	Jateng Pos	Jawa Pos	Media Indonesia	Wawasan
Tribun Jateng	Metro Jateng	Republika	Kompas	Media Online

Wilayah Berita: Kabupaten Pekalongan

Halaman 1 dan 7

Direktur Ungkap Aliran Dana ke Bupati Pekalongan

Dugaan Korupsi Insentif Pejabat RSUD Kraton

SEMARANG - Penyidik Subdit III/ Tipidkor Ditreskrimsus Polda Jateng memeriksa dr Muhammad Teguh Imanto SpB (Onk) M.Kes, tersangka dugaan korupsi pada BLUD RSUD Kraton Kabupaten Pekalongan, Selasa (14/8).

Dugaan korupsi terjadi bermodus pemotongan remunerasi atau intensif manajerial para pejabat struktural RSUD tahun ang-

garan 2014-2016. Penyidik menduga adanya kerugian negara Rp 4.227.319.755 dalam kasus itu.

Pemeriksaan dilakukan penyidik, Selasa (14/8) kemarin di Rutan Kelas IIA Kota Pekalongan oleh tiga penyidik Ditreskrimsus. Dalam kasus itu penyidik hanya menetapkan dr Muhammad Teguh Imanto sebagai tersangka tunggal selaku Direktur RSUD Kraton.

"Tersangka dijerat dengan pasal 2 (1) subsidair pasal 3 UU nomor 31/1999 sebagaimana diubah UU nomor 20/ 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dia juga dijerat pasal 12 huruf (f), UU yang sama," ungkap Direskrimsus Polda Jateng, Kombes Pol Hendra Suhartiyono dalam surat panggilannya.

T Arsyad SH, pengacara M Teguh Imanto kepada wartawan mengungkapkan, pemberian intensif bagi pejabat struktural telah sesuai dengan rumusan dan ketentuan. Terkait pemotongannya, diakuinya didasarkan kesepakatan bersama pejabat struktural RSUD Kraton.

"Uang dihimpun Kabag Keuangan selaku bendahara dalam rekening tumpangan dan digunakan untuk dana taktis, operasional rumah sakit," ungkapnya usai mendampingi pemeriksaan.

Selain operasional, pihak M Teguh mengakui, dana intensif juga mengalir ke sejumlah pejabat di Pemkab.

"Uang pemotongan itu juga mengalir ke pejabat," kata dia, kemarin.

Dugaan pemotongan intensif manajerial pejabat struktural RSUD Kraton bagi eselon II, eselon III a dan III b terjadi sejak 2014-2016. Sesuai ketentuan

pemerintah, pejabat pengelola BLUD berhak atas remunerasi sesuai dengan tingkat tanggung-jawab.

Pelaksanaannya, direktur menerbitkan Surat Keputusan (SK) pemberian insentif manajerial bagi 13 pejabat RSUD Kraton pada 2014 silam. Mereka yang berhak, pejabat eselon II Direktur dan Wadir (dua), eselon III a para Kabag (tiga) dan eselon III b (tujuh). Nilai intensif dihitung sesuai rumusan ketentuan.

Eselon II rata-rata berhak Rp 70 juta perbulan, eselon III a Rp 30 juta dan eselon III b Rp 17,5 juta. Namun, intensif itu tak pernah diberikan, tapi ditampung bendahara keuangan, Rizky Tesa Malela dalam rekening penampungan. Termasuk jatah tersangka M Teguh Imanto.

Sesuai kesepakatan pejabat struktural, dana intensif ditampung sebagai dana taktis operasional RSUD. Sesuai kebutuhan, para Wadir, Kabag dan Kasubag dapat meminta pencairannya ke bendahara untuk kegiatan. Penggunaannya dilaporkan bendahara ke direktur.

Selain kepentingan RSUD, dana itu diketahui diberikan ke sejumlah pejabat Pemkab sejak 2014-2016. Setiap bulan, mereka disebut diberikan jatah tunai oleh bendahara yang juga keponakan Amat Antono. Penyidik masih menyelidiki motif pemberian dan penerimaan itu.

Informasi yang dihimpun menyebutkan, besaran dana yang ditampung sekitar Rp 120 juta - Rp 150 juta perbulan sejak 2014-2016. Aliran ke Amat Antono terjadi sejak 2013 sampai 2015. Bupati Asip Kholbi sejak 2015 - 2016 sekitar Rp 30 juta perbulan.

Arini Harimurti, Wabup 2015 - 2016 sekitar Rp 25 juta. Sekda Mukaromah Syakoer 2014 sampai 2016 sekitar 20 juta perbulan serta instansi daerah terkait.

Maret 2017 silam, penyidik telah memeriksa sejumlah saksi, diantaranya Wakil Bupati Pekalongan, Arini Harimurti. Arini datang ditemani suaminya, Amat Antono, Bupati Pekalongan periode 2011 - 2016.

Arini menjadi salah satu penerima aliran dana insentif manajerial itu. Tiga kali ia menerima, per bulan masing-masing Rp 20 juta atau totalnya Rp 60 juta secara tunai.

Dalam kasus itu, Amat Antono juga menerima aliran Rp 30 juta per bulan selama menjabat dan telah mengembalikan Rp 400 juta. Informasinya, ia menambah pengembalian dengan total Rp 1,2 miliar.

"Wabup (Arini) dapat Rp 60 juta. Uang itu sumbernya dari pemotongan insentif," kata Kombes Lukas Akbar Abriari saat menjabat Direskrimsus, usai pemeriksaan Arini.

Informasi penyidik, selain dari Arini dan Amat Antono, pengembalian juga dilakukan Bupati Pekalongan saat ini Asip Kholbi Rp 90 juta. Serta Sekda Mukaromah Syakoer dan sejumlah SKPD terkait.

"Kami cari tahu tujuannya untuk apa," lanjut Lukas membenarkan.

M Teguh Imanto kini mendekam di Rutan Pekalongan usai dieksekusi Kejari Kabupaten Pekalongan tanggal 16 Mei 2017 lalu. Dalam perkara nomor.1828 K./Pid.Sus/2017 ia dipidana 6 tahun, denda Rp 500 juta dalam korupsi pengadaan Alkes RSUD Kraton tahun 2015. (**ant/udi**)